

Nasib PTIK



Oleh: Adrianus Meliala *)

Mencetak pimpinan polisi atau mencetak uang? Hal itu, konon, pernah muncul sebagai pertanyaan ketika sekitar 13 tahun lalu terdapat rencana pimpinan Polri melakukan *ruijslaag* atau tukar guling atas kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pertanyaan itu bukannya tidak relevan. Jika dilihat dari lokasi kampus di jalan Tirtayasa Jakarta Selatan, bisa dibayangkan jika kampus itu berubah menjadi apartemen, perkantoran ataupun pertokoan. Nilai bangunan maupun sewanya tentu akan amat mahal. Sehingga, wajar jika ada yang berpikir lebih untung mencetak uang ketimbang mencetak pimpinan polisi di lahan tersebut.

PERTIMBANGAN ekonomistik tersebut, untungnya, tidak jadi berlaku. Gedung PTIK tidak jadi di-*ruijslaag*. Bahkan, khususnya di tangan Irjen Farouk Muhammad sewaktu menjabat Gubernur, kompleks PTIK "disulap" menjadi deretan bangunan baru yang apik dan berkelas. Sang profesor lulusan Talahassee USA itu berhasil meyakinkan Kapolri Da'i Bachtiar ketika itu untuk mengalokasikan seluruh penerimaan Polri dari SSB (SIM, STNK dan BPKB) selama setahun untuk pembangunan gedung-gedung PTIK.

Tidak hanya itu. Selama masa Farouk menjabat, berbagai terobosan menyangkut perangkat lunak pendidikan tinggi juga dilakukan. Misalnya, diterimanya sejumlah dosen non-polisi yang kini menjadi tenaga fungsional. Tak bisa dilupakan pula, adalah perbaikan fasilitas bagi tenaga pengajar yang, salahsatunya, dimaksudkan untuk menekan kemungkinan "penyimpangan" oleh staf pengajar. Rata-rata anggota komunitas PTIK mengakui, kebiasaan "soto-menyoto" (memberi atensi khusus pada dosen dengan harapan memperoleh nilai tinggi) amat berkurang pada era Farouk. Juga perlu disebut adanya Program Belajar Jarak Jauh (PBJJ) yang memungkinkan PTIK melakukan percepatan pendidikan bagi lulusan-lulusan Akademi Kepolisian (Akp) sehingga masa pendidikan 6 semester menjadi cukup 3 semester saja.

Yang terakhir ini cukup strategik dibicarakan mengingat apabila kinerja PTIK dalam mendidik tetap seperti biasa, maka jumlah lulusan

Akpol yang tidak bisa melanjutkan studi di PTIK akan semakin besar. Kompetisi yang ketat menjadikan tingginya kecenderungan para lulusan Akpol untuk berbuat segala hal guna dapat masuk PTIK. Di pihak lain, cara berpikir bahwa tidak semua lulusan Akpol dapat masuk PTIK (mengingat ada unsur kompetisi), atau minimal tidak dapat masuk dalam waktu bersamaan, kurang dapat diterima kalangan polisi muda. Mereka nampaknya lebih melihat hal itu sebagai suatu "ketidakberuntungan" ketimbang indikasi bahwa mereka kalah kualitas dibanding yang dapat masuk PTIK. Alhasil, PTIK perlu merespons itu dengan cara memperpendek masa studi bagi setiap angkatan. Hal itu mungkin dilakukan mengingat, sebelum berangkat ke Jakarta, para mahasiswa telah menempuh PBJJ melalui kuliah bersama staf pengajar yang sengaja didatangkan ke polda masing-masing atau melalui modul-modul tayangan audio-visual.

Dewasa ini, "antrian" lulusan Akpol tidak ada lagi. Kasak-kusuk bahwa harus membayar sekian puluh juta untuk masuk PTIK, juga tidak terdengar lagi. Tapi, ada masalah baru menghadang PTIK. Apa itu?

Sebenarnya, masalah baru itu tidak berasal atau berawal dari PTIK sendiri. Tetapi, berawal dari kebijakan Polri agar Akpol tidak lagi menerima lulusan SLTA melainkan sarjana dan magister. Tugas Akpol dengan demikian sepenuhnya berubah, tidak lagi menyelenggarakan pendidikan diploma 3 (setara akademi), tetapi hanya menyelenggarakan pendidikan pembed-

Asca Likuidasi

tukan pertama untuk perwira (setara pendidikan profesi internal bagi para calon pegawai). Untuk itu, nama Akademi Kepolisian konon akan diubah menjadi 'Pusat Pendidikan Kepolisian'. Kurang lebih begitu.

Sebagai implikasinya pula, ke depan, tidak akan ada lagi sumber masukan (*intake*) bagi PTIK. Pendidikan kedinasan lanjutan bagi para perwira yang telah sarjana atau magister itu adalah Selapa dan kemudian Sespim. Logika selanjutnya, jika Akpol tidak ada lagi, maka PTIK pun tidak perlu ada sehingga layak dilikuidasi pula.

Selaku pengamat, penulis memang pernah suatu kali berpikir, cepat atau lambat, baik Akpol atau PTIK perlu dilikuidasi. Pertimbangannya, selain tidak efisien (mengingat pendidikan kesarjanaannya seyogyanya menjadi tugas lembaga pendidikan umum dan tidak membebani organisasi profesional seperti Polri), meluluskan perwira dengan kemampuan setara diploma jelas tidak lagi memadai. Hal ini mengingat, seluruh rekan kerja kepolisian selaku aparat sistem peradilan pidana adalah para sarjana hukum atau sarjana sosial, entah itu para jaksa, hakim, petugas masyarakat atau pengacara.

Sayang sekali, pertimbangan melikuidasi Akpol (dan merubah formatnya) demikian pula rencana melikuidasi PTIK (konon akan diubah menjadi lembaga pendidikan tinggi umum) terjadi dalam konteks perencanaan parsial alias tidak komprehensif serta tidak tuntas. Mengapa demikian? Sebagaimana diketahui, format sistem pendidikan Polri amat "ribet" dan tidak efisien. Walau reformasi Polri telah berja-

lan 10 tahun dan telah menyentuh berbagai hal di masing-masing lembaga pendidikan Polri (termasuk PTIK), tapi belum ada perubahan yang komprehensif menyangkut sistem pendidikan Polri itu sendiri. Selain itu, masih juga ditemui ketidakjelasan terkait hubungan kerja antar lembaga-lembaga pendidikan maupun dengan lembaga lain, kompetensi lulusan, kualifikasi tenaga pendidik, penganggaran dan sebagainya.

Seyogyanya, *big picture* yang amburadul itulah yang dibenahi terlebih dahulu. Kalaupun kemudian Akpol dan PTIK hendak dilikuidasi, maka itu merupakan implikasi yang logis dari suatu rencana perubahan yang terencana.

Maka, dalam konteks rencana mengubah format PTIK ke depan yang tidak disertai cetak biru atau *blue-print* reformasi Sisdik Polri, semua pihak perlu berkomitmen bahwa apa yang akan diputuskan terkait PTIK bersifat politis namun mengikat. Dengan kata lain, siapapun yang menjadi Kapolri di masa depan, tidak bisa lagi menganulir keputusan sebelumnya terkait PTIK hanya karena alasan pribadi. Alasan lain adalah, kalau sekali waktu PTIK diputuskan tidak lagi menjadi lembaga pendidikan kedinasan dan diubah menjadi lembaga pendidikan umum (hal ini tidak akan susah untuk dilakukan mengingat PTIK telah amat memenuhi syarat), kiranya keputusan itu tidak akan bisa ditarik atau diubah lagi mengingat masyarakat telah terlibat. Untuk itu, segala kebijakan menyangkut masa depan PTIK hendaknya dipikirkan matang-matang.

Penulis menyarankan, apabila

PTIK hendak direvitalisasi, maka ada baiknya dipikirkan tiga opsi sebagai berikut: Pertama, aset PTIK dihibahkan kepada Universitas Bhayangkara yang selama ini telah beroperasi sehingga menjadi perguruan tinggi yang semakin besar dan mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi swasta lainnya. Kedua, didirikan perguruan tinggi baru yang diharapkan dapat menjadi kompetitor Universitas Bhayangkara sebagai perguruan tinggi yang juga dimiliki Polri. Ketiga, PTIK dijadikan kampus Selapa sehingga kampus Selapa di Pasar Jumat sekarang dapat digunakan oleh sekolah polwan (sepolwan) dalam rangka mendidik polwan dalam jumlah yang semakin besar guna mempercepat proporsi polwan dalam Polri.

Sayang sekali, memang, saat memperingati hari jadinya tahun ini, PTIK malah harus bersiap-siap untuk mengakhiri kiprahnya.

*) Adrianus Meliala
Guru Besar Kriminologi FISIP UI

Saat ini, media massa di Indonesia baik cetak maupun elektronik selalu diramaikan berita tentang insiden yang terjadi di Monas pada 1 Juni yang lalu antara FPI, Front Pembela Islam dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, berikut tanggapan masyarakat mengenai insiden tersebut:



SAMPAI KEAKARNYA

BUCE
TEKNISI PLN

TERJADINYA Insiden pemukulan yang dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) kepada anggota Aliansi Kebangsaan untuk Umat Beragama dan Berkeyakinan kemarin merupakan salah satu insiden yang memalukan bagi umat Islam,, karena hal tersebut dapat memecah belah agama.

Solusinya adalah kita harus mencari permasalahannya dimana, harus kita cari siapa yang salah dan siapa yang benar.

Penangkapan anggota Front Pembela Islam oleh aparat dinilai sudah bagus, karena memang tugas mereka sebagai penegak hukum untuk bisa menegakkan keadilan, jadi kalau bisa siapa yang bersalah, yah harus ditangkap, kalau bisa sampai ke akar-akarnya. [Eva JT 003]

MENGAPA HANYA FPI YANG DITANGKAP?

FARIZ
WIRUSAHAWAN

INSIDEN yang terjadi di Monas beberapa waktu yang lalu hanyalah pengalihan isu dari pembubaran Ahmadiyah menjadi pembubaran FPI, dari isu kenaikan BBM menjadi pembubaran FPI, termasuk isu gubernur Maluku Utara, banyak sekali terjadi muatan politis disana.

Sejak semula, Front Pembela Islam (FPI) memang mempunyai agenda acara di Monas, sedangkan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan akan mengadakan acara di Bundaran Hotel Indonesia, dan Monas hanya dijadikan titik kumpul anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Namun temuata AKKBB tersebut masuk ke Monas, dan insiden itupun terjadi.

Ada sebab, pasti ada akibat, insiden itu terjadi karena ada salah satu ormas yang memancingnya, dalam hal ini, anggota Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, mereka mengatakan hal-hal yang memancing emosi para anggota Front Pembela Islam, malah ada yang mengeluarkan senjata dan menembakan ke udara untuk memancing massa FPI untuk menyerang.

Jika kita dalam kondisi seperti itu, saya rasa pasti akan terpancing untuk menyerang, terlepas, dari memang itu adalah sebuah kesalahan, bahwa FPI menyerang, bahkan memukuli mereka, tetapi itu tidak bisa dilihat dari FPI menyerang saja, artinya tetap ada pemicunya, dan pemicunya. Jadi kalau mau ditangkap, yah tangkap semuanya, jangan hanya salah satu ormas yang ditangkap.

Aparat bertindak memang sesuai dengan prosedur yang sudah mereka punya, dan saya tetap yakin, bahwa mereka berangkat dengan sisi profesionalitas, artinya kalau mereka membutuhkan kekuatan segitu besar, untuk menangkap orang FPI yah silahkan, tetapi yang jadi masalah adalah mengapa hanya dari FPI yang ditangkap, sementara yang pertama kali bikin ulah itu adalah anggota AKKBB, karena mereka yang tidak punya izin masuk ke Monas. (Eva JT 003)



MENCORENG NAMA AGAMA

ALIA FELECIA

MAHASISWI UNIVERSITAS PAJAJARAN



FOTO: EVA HARTINI

bercinta kasih, bersatu, saling menyayangi semua umat manusia. Tidak ada perintah kita harus berkasih sayang hanya dengan sesama pemeluk agama tertentu, itu tidak ada, tetapi pada seluruh umat manusia, apapun agama mereka.

Aparat kepolisian sudah melakukan teguran, dan tindakan aparat sudah sesuai dengan prosedur. Yang terpenting adalah

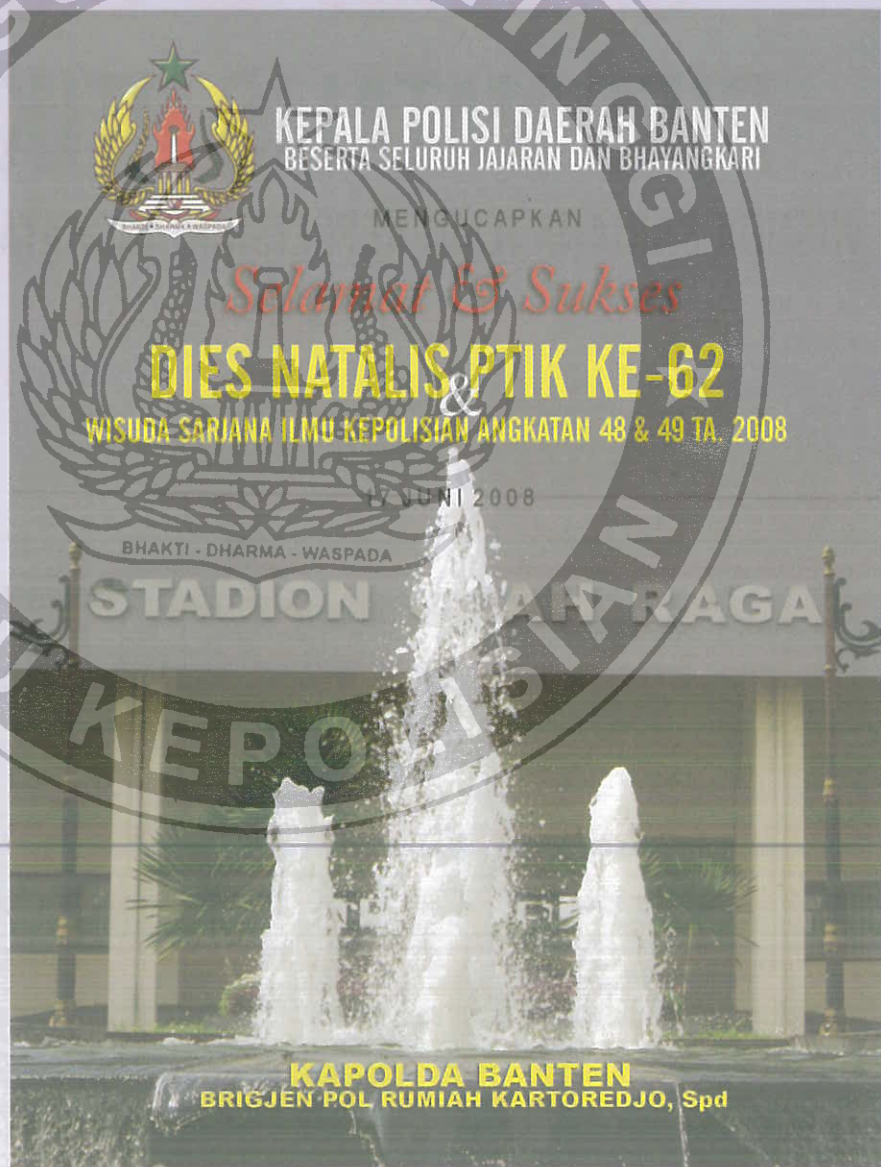
aparat yang menangkap mereka yang bersalah dapat bertindak tegas pada siapa saja namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Agama apapun yang dianut massa yang bentrok tersebut, pejabat atau rakyat biasa, orang kaya atau miskin dapat diperlakukan secara adil dan tidak ada pembedaan.

[Eva JT 003]

SANGAT menyesali adanya insiden yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008, bertepatan dengan peringatan hari Pancasila. Yang terberat dari insiden/ bentrokan yang terjadi antara anggota Front Pembela Islam dengan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan tersebut ada nama Islam disitu. Setiap agama, tidak hanya Islam, mengajarkan untuk menjalin persatuan, kesatuan, bertaqwa, beriman. Dan hal seperti itu, mungkin entah sadar atau tidak sadar, mereka melupakan hal tersebut. Padahal itu merupakan hal yang paling mendasar disetiap agama.

Dengan adanya insiden itu seperti membuktikan pada masyarakat luas, bahkan dunia, bahwa seolah-olah, Islam tidak mengajarkan hal yang baik, Islam tidak mengajarkan perdamaian, Islam tidak mengajarkan persatuan, Islam tidak mengajarkan berkasih sayang, menyayangi sesama.

Baik agama Islam, Kristen, Hindu maupun Budha atau apapun agama mereka, mereka tetap umat Tuhan dan kita harus berkasih sayang,



KAPOLDA BANTEN
BRIGJEN POL RUMIAH KARTOREDJO, Spd



**DIRESKRIM POLDA SULAWESI SELATAN
BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI**

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

DIES NATALIS PTIK KE-62

WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN ANGGKATAN 48 & 49 TA. 2008

17 JUNI 2008

**DIR RESKRIM POLDA SULAWESI SELATAN
KOMBES POL Drs SOBRI EFFENDY SURYA**